

The Role of Financing in Improving the Quality of Educational Services

Aprilliantoni¹, Lailatul Fitriah Eka Putri², Rosulinawati³, Wiwi Uswatiyah⁴

^{1,2,3}Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi

⁴IAI Nasional Laa Roiba Bogor

aprilliantoni@unismabekasi.ac.id¹, lailatulspdi58@guru.sd.belajar.id²

rosulinawati98@sma.belajar.id³, wiwiuswatiyah@gmail.com⁴

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze access to education services on budget management, and its impact on service quality. The research method uses a qualitative approach with a case study method. This approach was chosen to gain an in-depth understanding of how education financing is implemented and managed in one of the public elementary schools in Bekasi. The results of the study indicate that schools face challenges of delays and limited funds, which have a negative impact on facilities, teaching materials, and extracurricular activities. Lack of transparency is also a problem that reduces stakeholder trust. However, with infrastructure improvements, optimal use of technology, and diversification of funding sources, schools can significantly improve access and quality of education. This study provides recommendations for improving the education financing system and services in schools, so that they can create a more inclusive learning environment and support optimal student development.

Keywords : financing, education, budget, service quality.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akses pelayanan pendidikan pada pengelolaan anggaran, dan dampaknya terhadap kualitas layanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pembiayaan pendidikan diterapkan dan dikelola di salah satu sekolah dasar negeri di Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah menghadapi tantangan keterlambatan dan keterbatasan dana, yang berdampak negatif pada fasilitas, bahan ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kurangnya transparansi juga menjadi masalah yang mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, dengan perbaikan infrastruktur, pemanfaatan teknologi secara optimal, diversifikasi sumber dana, sekolah dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem pembiayaan pendidikan dan pelayanan di sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

Kata kunci : pembiayaan, pendidikan, anggaran, kualitas pelayanan.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan di Indonesia telah menjadi isu sentral dalam upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan. Berbagai kebijakan dan model pembiayaan pendidikan telah diterapkan dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan alokasi dana antara daerah perkotaan dan pedesaan. Wijaya (2017) dalam hasil studinya menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan dana, yang

berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan. Distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata mengakibatkan disparitas dalam kualitas infrastruktur dan sumber daya pendidikan. (Anwar, 2018).

Perubahan ekonomi dan sosial menuntut adanya reformasi kebijakan pembiayaan yang lebih efektif dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Program-program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu secara ekonomi. (Rahmawati, 2020). Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. (Sari, 2021).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi 5 (lima) K, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Mutu pendidikan merupakan kemampuan sekolah dalam mengelola komponen-komponen secara fungsional dan efektif untuk menghasilkan nilai tambah sesuai dengan standar yang berlaku pada komponen-komponen tersebut. Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan usaha yang serius dan nyata dari semua pihak. (Fadhli, 2017; Muspawi & Lukita, 2023). Biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dasar dan proses belajar-mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan. (Fattah, 2001). Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Pembiayaan pendidikan senantiasa berhubungan dengan mutu pendidikan dan pembelajaran.

Pendidikan yang berkualitas selalu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. (Muspawi & Lukita, 2023). Sekolah yang tidak mampu melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal karena masalah biaya, baik dalam membayar guru maupun dalam menyediakan kesempatan belajar dan sarana prasarana sekolah. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam mengelola dana pendidikan.

Pemanfaatan dana operasional sekolah memberikan pengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. (Fatonah, 2021). Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah sistem anggaran pendidikan, baik dari mekanisme penyaluran ataupun segi metode perhitungan. Sekolah sebagai unit kerja bertugas mengelola keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber serta memiliki kewenangan dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan sekolah seperti untuk membiayai proses belajar mengajar, melengkapi sarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan pegawai sekolah, dan lain sebagainya. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) digunakan sebagai dasar untuk menyalurkan dan menggunakan sumber dana yang ada.

Sekolah dasar negeri di Bekasi sebagai satuan pendidikan memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan secara mikro maupun makro. Meskipun fungsi-fungsi setiap komponen berbeda-beda, tetapi semua komponen mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, tersedianya sumber-sumber pembiayaan dan komponennya, mekanisme pengalokasian dana yang ditetapkan melalui sistem, penggunaan dana yang efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan terukur (akuntabilitas), model pembiayaan pendidikan yang diterapkan, tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sehingga masalah dalam penggunaan biaya pendidikan dapat diminimalisir.

TINJAUAN LITERATUR

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya. (Nata, 2010; Winarsih, 2016).

Cohn (1979) dalam teori ekonomi pendidikan menggunakan pendekatan *human capital*, yakni aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Taraf produktivitas akan mempengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok. Hal ini akan berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Smith (1776), *human capital* berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik *rate of return* yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan *human capital* terdapat hubungan linier antara investasi pendidikan dengan *higher productivity* dan *higher earning*.

Menurut Fattah (2004), pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Pembiayaan sekolah menurut Levin (1987) adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni *school revenues*, *school expenditures*, *capital* dan *current cost*. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. (Masditou, 2017; Feronika, 2015; Fattah, 2008).

Pembiayaan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dapat dirumuskan ke dalam empat langkah, yaitu konsep pembiayaan pendidikan, model pembiayaan pendidikan, formulasi pembiayaan pendidikan, dan pengukuran pembiayaan pendidikan.

- a. Konsep pembiayaan pendidikan atau suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya.
- b. Model pembiayaan pendidikan pada prinsipnya memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Formulasi model pembiayaan pendidikan, antara lain 1) Model sumber pembiayaan (*the resources cost model*) yang menerapkan suatu prototype pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah; 2) Model surat bukti atau penerimaan (*models of choice and voucher plans*) memberikan corak pembiayaan pendidikan yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pendidikan; 3) Model rencana bobot siswa (*weight student plan*) merupakan model pembiayaan pendidikan yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya; 4) Model berdasarkan pengalaman (*historic funding*). Model ini sering disebut *incrementalism*, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian; 5) Model berdasarkan usulan (*bidding model*) ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria. 6) Model berdasarkan kebijaksanaan (*discretion model*) memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.
- c. Pengukuran pembiayaan pendidikan merupakan keterkaitan antara kinerja manajemen dengan kewajaran biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan kewajaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik. (Aflaha, 2021).

Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari pengajian/pendapatan (*revenue theory of cost*). Dalam menghitung biaya pendidikan, faktor input dan output dari pendidikan serta proses yang ada didalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dapat dihitung menggunakan teknik (*cost analysis*), yaitu (1) *productiity measurement* atau analisa *cost-effectiveness* atau (2) analisa *cost-benefit*. Hasil perhitungan biaya pendidikan dapat mengevaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak baik untuk individu tersebut (*private rate of return*) ataupun untuk masyarakat secara luas (*social rate of return*). (Fattah, 2008).

Pembiayaan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 1) kenaikan harga (*rising prices*); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's sallaries*); 3) perubahan

dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak sekolah (negeri); 4) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*). Faktor-faktor di atas akan mempengaruhi penetapan kebijakan pemerintah maupun sekolah dalam menentukan anggaran pendidikan.

Fattah (2008) mengemukakan bahwa perubahan hubungan antara input dan output dalam pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeda, yaitu:

- 1) Teknik pengukuran produktivitas atau analisa efektivitas biaya. Efektif tidaknya dilihat dengan mengukur biaya input, yaitu gaji guru, pengeluaran untuk pembelian buku-material peralatan, penggunaan bangunan atau peralatan, sedangkan *output*, yaitu pencapaian objektif seperti jumlah lulusan, hasil ujian, atau pendapatan masa depan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan dapat berupa jumlah lulusan, hasil ujian, atau pendapatan masa depan yang diharapkan.
- 2) Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Biaya dan manfaat diukur dalam hitungan ekonomi atau keuangan. Ini diekspresikan dalam bentuk konsep rasio antara *present value* dari biaya dengan *present value* dari manfaat di masa depan yang diharapkan (*rate of return on the investment*). Tujuan dari setiap analisis *cost-benefit* untuk membandingkan *opportunity cost* dari suatu project dengan benefit yang diharapkan, diukur dengan tambahan pendapatan yang akan terjadi di masa depan sebagai hasil dari suatu investasi.

Analisis di atas dapat digunakan untuk evaluasi pendidikan sebagai suatu investasi, baik untuk individu maupun masyarakat. Kalkulasi *private rate of return* terhadap investasi pendidikan menunjukkan sejauh mana keuntungannya bagi individu bersangkutan atau untuk keluarganya dengan berinvestasi dalam pendidikan. Sedangkan *social rate of return* menyediakan *yardstick* dalam mengevaluasi pendidikan sebagai suatu investasi sosial. Keduanya melihat biaya pendidikan sebagai suatu *opportunity cost*. (Fattah, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pembiayaan pendidikan diterapkan dan dikelola di sekolah. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna pada beberapa individu atau sekelompok orang. (Cresswell, 2009). Hasil penelitian ini biasanya disampaikan melalui naratif, menggunakan hasil analisis deskriptif interpretatif serta pemaknaan atas data, kejadian, dokumen, dan simbol yang ditemukan dalam proses pengumpulan data lapangannya. (Sedarmayanti, 2011).

Penelitian dilakukan di salah satu sekolah dasar negeri yang berlokasi di Bekasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, staf administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, guru, dan beberapa siswa. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam terkait pembiayaan pendidikan.

Analisis data melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, presentasi data, dan penyimpulan/konfirmasi hasilnya. (Miles & Huberman, 1984; Sugiyono, 2019).

Penggunaan triangulasi mencakup verifikasi keabsahan data, pencarian data yang valid, dan penguatan data dengan cara menyatukan atau menggabungkan berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang kompleks dari segi sudut pandang dan perspektif yang beragam. (Sugiyono, 2019).

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi reduksi data, dimana data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disederhanakan dan dikategorisasikan. Kemudian, data disajikan dalam bentuk naratif yang terstruktur untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Sumber utama dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kontribusi dari komite sekolah. Namun, kepala sekolah menyatakan bahwa dana yang diterima dari pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Staf administrasi menjelaskan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, mereka menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana yang terbatas untuk berbagai keperluan, seperti perbaikan infrastruktur, pengadaan bahan ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru-guru mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk pelatihan dan pengembangan profesional, serta kendala dalam penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Adapun dokumentasi yang dianalisis, termasuk laporan keuangan sekolah, dokumen anggaran, dan kebijakan terkait pembiayaan pendidikan. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran lebih dalam mengenai kondisi keuangan sekolah.

Temuan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan mencerminkan alokasi dana yang sering kali tidak memadai untuk perbaikan infrastruktur dan pengadaan bahan ajar, dimana sebagian besar dana lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional rutin seperti gaji guru dan biaya listrik. Selain itu, dokumen anggaran mengindikasikan ketidakselarasan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana. Beberapa pos anggaran mengalami pengurangan akibat realisasi dana yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan. Meskipun kebijakan pengelolaan dana yang diterapkan telah sesuai dengan pedoman pemerintah, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas sekolah, seperti ruang kelas dan laboratorium, masih memerlukan peningkatan. Sementara itu, wawancara dengan guru dan staf administrasi menyoroti perlunya pelatihan tambahan untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Dokumentasi yang dianalisis mengindikasikan bahwa meskipun dana pemerintah stabil, ada ketergantungan yang berlebihan pada dana tersebut. Diversifikasi sumber dana dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi solusi yang diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan

akses serta kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut.

Berdasarkan data di atas, akses layanan pendidikan di sekolah menyebabkan keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas fasilitas dan sumber daya pendidikan, pengelolaan dana yang cermat dan sesuai pedoman pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang ada dan keterlibatan dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Beberapa poin penting terkait pembiayaan pendidikan di sekolah menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengelola dana pendidikan secara hati-hati dan sesuai pedoman pemerintah, sekolah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Keterbatasan dana menghambat perbaikan infrastruktur dan pengadaan bahan ajar yang memadai, serta berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan.

PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Pendidikan tidak efisien

Biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dasar dan proses belajar-mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan. (Fattah, 2001). Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Pembiayaan pendidikan senantiasa berhubungan dengan mutu pendidikan dan pembelajaran. Adapun pembiayaan sekolah menurut Levin (1987) adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah.

Temuan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan mencerminkan alokasi dana yang sering kali tidak memadai untuk perbaikan infrastruktur dan pengadaan bahan ajar, di mana sebagian besar dana lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional rutin seperti gaji guru dan biaya listrik. Selain itu, dokumen anggaran mengindikasikan ketidakselarasan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana. Beberapa pos anggaran mengalami pengurangan akibat realisasi dana yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan. Meskipun kebijakan pengelolaan dana yang diterapkan telah sesuai dengan pedoman pemerintah, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif. Pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak efisien menghambat berbagai aspek operasional dan pengembangan sekolah. Hal ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Sumber dana utama yang diterima sekolah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sekolah juga menerima kontribusi dari komite sekolah dalam bentuk sumbangan orang tua siswa. Meskipun terdapat berbagai sumber dana, alokasi dana yang diterima sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah secara menyeluruh. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa dana yang diterima dari pemerintah sering kali datang terlambat

dan jumlahnya lebih kecil dari yang diharapkan. Hal ini menyebabkan sekolah harus mengatur kembali prioritas penggunaan dana, yang sering kali mengorbankan program pengembangan dan perbaikan fasilitas. Akibatnya, banyak kebutuhan mendesak yang tidak terpenuhi, seperti perbaikan infrastruktur kelas dan pengadaan bahan ajar yang memadai.

Fattah (2008) mengungkapkan bahwa biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (*revenue theory of cost*). Dalam menghitung biaya pendidikan, faktor input dan output dari pendidikan serta proses yang ada didalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dapat dihitung menggunakan teknik (*cost analysis*), yaitu (1) *productiity measurement* atau analisa *cost-effectiveness* atau (2) analisa *cost-benefit*. Hasil perhitungan biaya pendidikan dapat mengevaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak baik untuk individu tersebut (*private rate of return*) ataupun untuk masyarakat secara luas (*social rate of return*).

Pengelolaan dana di sekolah dasar tersebut dilakukan oleh tim manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi. Meskipun mereka berusaha untuk mengikuti pedoman pengelolaan dana yang ditetapkan oleh pemerintah, wawancara dengan staf administrasi menunjukkan adanya kesulitan dalam mengalokasikan dana yang terbatas untuk berbagai keperluan. Observasi langsung di sekolah menunjukkan bahwa dana yang ada sering kali digunakan untuk kebutuhan operasional rutin, seperti gaji guru dan biaya listrik, sementara kebutuhan penting lainnya seperti perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pembelajaran terabaikan. Selain itu, dokumentasi keuangan yang dianalisis menunjukkan adanya ketidakselarasan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana. Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang dan prioritas yang jelas dalam penggunaan dana sekolah.

Adapun beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di sekolah dasar tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan teknis mengenai pengelolaan dana yang efektif. Guru-guru dan staf administrasi yang diwawancarai mengungkapkan perlunya pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana sekolah secara lebih efisien. Selain itu, keterlambatan distribusi dana dari pemerintah mengakibatkan sekolah harus mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti meminjam dana atau mengurangi frekuensi kegiatan tertentu. Observasi juga menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana menyebabkan ketidakpercayaan antara staf dan orang tua siswa. Mereka merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana sekolah.

Pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak efisien berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah dasar tersebut. Beberapa ruang kelas dalam kondisi kurang baik dengan furnitur yang sudah usang dan peralatan yang tidak memadai. Fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang kurang lengkap, juga mempengaruhi kualitas pembelajaran. Guru-guru mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan ajar yang

memadai, yang berdampak pada proses belajar mengajar. Program ekstrakurikuler yang penting untuk pengembangan keterampilan siswa di luar akademik, juga terpengaruh oleh keterbatasan dana. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat memperkaya pengalaman belajar siswa harus dikurangi atau bahkan ditiadakan karena kekurangan anggaran.

Beberapa langkah strategis untuk mengatasi pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak efisien. *Pertama*, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf administrasi, dan orang tua siswa, dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. *Kedua*, sekolah perlu mengembangkan rencana anggaran yang lebih matang dan realistis, dengan prioritas yang jelas sesuai kebutuhan mendesak dan jangka panjang. Pelatihan bagi staf administrasi dan guru dalam pengelolaan keuangan yang efektif juga perlu ditingkatkan, agar mereka memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengelola dana sekolah. *Ketiga*, diversifikasi sumber dana perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah. Kemitraan dengan pihak swasta, alumni, dan masyarakat sekitar dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana yang tidak tercukupi oleh anggaran pemerintah.

2. Layanan Pendidikan

Opportunity costs dari pendidikan dapat diukur sebagai biaya kepada individu (*private costs*) seperti biaya pendidikan, buku, dan peralatan dan biaya kepada masyarakat (*social cost*) seperti biaya gaji guru dan staf, buku, peralatan, bahan mentah, gedung. Kebanyakan analisis biaya pendidikan dikonsentrasikan kepada pengeluaran uang daripada *opportunity costs*, padahal keduanya sama pentingnya. Beberapa analisis biaya, seperti *costs benefit analysis* menggunakan biaya oportunitas daripada biaya uang. Analisis di atas digunakan untuk mengevaluasi pendidikan sebagai suatu investasi, baik untuk individu maupun masyarakat. Kalkulasi *private rate of return* terhadap investasi pendidikan menunjukkan sejauh mana keuntungannya bagi individu bersangkutan atau untuk keluarganya dengan berinvestasi dalam pendidikan. Sedangkan *social rate of return* menyediakan *yardstick* dalam mengevaluasi pendidikan sebagai suatu investasi sosial. Keduanya melihat biaya pendidikan sebagai suatu *opportunity cost*. (Fattah, 2008).

Layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Penelitian ini mengungkapkan berbagai layanan pendidikan yang dapat diberikan oleh salah satu sekolah dasar negeri di Bekasi kepada muridnya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi, temuan di atas menunjukkan adanya peluang untuk peningkatan layanan pendidikan yang lebih baik dan efektif.

Fasilitas pembelajaran yang diobservasi langsung di sekolah tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran masih memerlukan perbaikan. Beberapa ruang kelas dalam kondisi kurang baik, dengan furnitur yang sudah usang dan peralatan yang tidak memadai. Fasilitas laboratorium dan perpustakaan juga masih kurang lengkap. Untuk meningkatkan layanan pendidikan, sekolah dapat fokus pada perbaikan fasilitas, seperti perbaikan infrastruktur, memperbaiki ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan agar lebih nyaman dan mendukung proses belajar mengajar. Pengadaan furnitur baru, peralatan

laboratorium yang lebih canggih, dan koleksi buku yang lebih lengkap di perpustakaan dapat menjadi prioritas utama. Serta termasuk penggunaan teknologi memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaktivitas dan akses informasi. Penyediaan perangkat komputer dan akses internet yang memadai akan membantu siswa dalam mengakses sumber belajar digital dan meningkatkan keterampilan teknologi mereka.

Keterbatasan jumlah buku pelajaran dan bahan ajar lainnya menjadi salah satu kendala utama dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Guru-guru juga mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan ajar yang memadai. Upaya sekolah meningkatkan layanan pendidikan, yaitu mengalokasikan dana lebih untuk pengadaan sumber daya pendidikan yang lengkap dan berkualitas seperti, menyediakan buku pelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum. Ini akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru agar mereka dapat mengembangkan bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, guru-guru dapat menyajikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut cukup bervariasi, tetapi sering kali terkendala oleh keterbatasan dana. Beberapa kegiatan harus ditiadakan atau dikurangi frekuensinya karena kekurangan anggaran. Untuk meningkatkan layanan pendidikan, sekolah dapat mencari solusi alternatif untuk mendanai kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, dalam hal diversifikasi sumber dana, mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, alumni, dan masyarakat sekitar. Sumber dana tambahan ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dalam contoh lain dapat dirancang program beasiswa, memberikan beasiswa untuk siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Beasiswa ini bisa berasal dari donatur atau sponsor.

Layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah tersebut masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan. Dengan perbaikan fasilitas, penyediaan sumber daya pendidikan yang lengkap, dukungan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sekolah memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses layanan pendidikan melalui beberapa langkah positif, yakni memperbaiki infrastruktur, memanfaatkan teknologi secara optimal, diversifikasi sumber dana, peningkatan layanan konseling, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang lebih baik dan setara terhadap pendidikan berkualitas, memungkinkan mereka untuk meraih potensi penuh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. (2018). Dampak Distribusi Anggaran Pendidikan yang Tidak Merata terhadap Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(2), 89-102.
- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U.C. (2021). Masile: *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*. 1(1), 24-59.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Data Statistik Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, L. (2019). Perubahan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Konteks Ekonomi dan Sosial. Bandung: Penerbit Maju.
- Ferdi W. P., (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4),
- Feronika, R. (2015). Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 2(1),
- Fattah, N. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Fattah, N. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, No. 9.
- Junaedi, E. & Enas. (2018). Manajemen Pembiayaan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan. *IJEMAR: Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 2 (1),
- Kemendikbud. (2021). Laporan Tahunan tentang Alokasi dan Penggunaan Dana BOS. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muspawi, M. & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99-110.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*. 1(2).
- Nata, A. (2010). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, S. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan*, 18(1), 33-47.
- Sari, M. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Edukasi.
- Setiawan, A. (2019). Studi tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Sekolah Menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 123-135.
- Susilo, A. (2016). Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Syukri, M., Sitompul, I., & Banurea, O.K. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Medan: C.V Pusdikra Mitra Jaya.
- Wardani, D. (2018). Evaluasi Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 56-70.
- Wijaya, B. (2017). Kesenjangan Alokasi Dana Pendidikan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan. Surabaya: Pustaka Mandiri.
- Winarsih, S. (2016). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Proceeding on International Conference*

Transformasi Manageria
Journal of Islamic Education Management
Vol 5 No 1 (2025) 50 – 61 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710
DOI: 10.47476/manageria.v5i1.5735

on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN, Vol. 1, 124-135.

Yulianto, S. (2017). Analisis Perbedaan Kualitas Pendidikan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 10(3), 245-260.